

Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money*

Evaluation Of Measurement Of Performance Program Activities Of The Bureau Of North Sulawesi Regional Secretariat Organizations Based On The Concept Of Value For Money

Franclin Alexandria Lintang¹, Treesje Runtu², Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado

Email : franclinlintang@gmail.com¹ afandiafandibaksh@gmail.com³

Abstrak : Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama: 1) Ekonomi, yang terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. 2) Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui apakah kinerja anggaran pada Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi syarat Value For Money dari segi elemen Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa program atau kegiatan Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 - 2019 telah memenuhi syarat Value For Money dengan menunjukkan hasil yang ekonomis, efisien, dan efektif. Kata Kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Konsep Value For Money

Abstract : Value For Money is a concept of managing public sector organizations based on three main elements: 1) Economics, which is related to the extent to which public sector organizations can minimize input resources used to avoid wasteful spending. 2) Efficiency, is the achievement of maximum output with certain inputs or the use of the lowest inputs to achieve certain outputs. 3) Effectiveness, namely the level of achievement of program results with the set targets, or simply a comparison of outcomes with outputs. This study aims to: determine whether the budget performance at the Bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province has met the Value For Money requirements in terms of elements of Economy, Efficiency, and Effectiveness. Data obtained by conducting interviews and documentation. The analytical method used in this thesis research is a qualitative descriptive method in which each data collected is analyzed and then a conclusion is drawn. The results of the study showed that the program or activity of the Regional Secretariat Organizational Bureau of North Sulawesi Province in 2018 - 2019 had fulfilled the Value For Money requirements by showing economic, efficient, and effective results. Keywords: Economy, Efficiency, Effectiveness.

Key Words : Performance Measurement, Value For Money Concept.

PENDAHULUAN

Diterima: 19-01-2023 Disetujui untuk Publikasi: 24-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam pemerintahan, pengukuran kinerja diperlukan untuk menganalisis akuntabilitas dalam menghasilkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Tugas dari pemerintah daerah dalam mengolah daerah sendiri adalah hal yang patut di lakukan agar dapat membangun dan mengelolah daerah masing-masing dengan baik. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memusatkan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengolah potensi masing-masing daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep penilaian atau pengukuran kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Melalui konsep ini dapat memberikan informasi berupa indikator apakah (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh dapat mengurangi *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan perolehan *output* yang memadai dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mendapatkan *output* tertentu. Efektivitas adalah tingkat perolehan hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perpaduan *outcome* dengan *output*. Dalam mengukur *value for money* indikator yang dipakai yaitu diambil dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah.

Biro Orgnisasi Sekertariat Daerah adalah salah satu instansi yang menyajikan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi dan hubungan antara lembaga, kemasyarakatan dan hubungan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. **Evaluasi Pengukuran Kinerja Program Kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money.**

Akuntansi Pemerintahan ialah akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan Negara dari anggaran hingga pelaporan, termasuk pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni, 2015 : 18). Akuntansi pemerintahan termasuk juga lembaga-lembaga non profit yang mengkhususkan pada masalah dan pelaporan transaksi dari pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Fungsi dari akuntasni pemerintahan adalah mengadakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan adminstrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sadeli, 2015 : 6).

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang. Dalam suatu organisasi, kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun, 2013 : 25)

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) menurut Mahsun (2013:26) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009 : 121), pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Menurut PP No 34 Tahun 2005 Pengertian anggaran adalah sebuah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam saham rupiah yang disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistemasi untuk satu periode.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2017:48).

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualan untuk tahun depan (Sasongko dan Parulian 2015:2).

Penyusunan anggaran berorientasi dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan dimasa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2017:219) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan..
3. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal.

Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan kedalam empat fungsi pokok yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan)

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Didalamnya fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai dimasa mendatang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai dimasa depan telah ditetapkan, maka dari itu harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana. Dimulai dari upaya mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan.

3. *Actuating* (Menggerakan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4. *Controlling* (Pengendalian)

Setelah aset-aset yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan dikoordinasikan untuk bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing, tahap selanjutnya adalah menjamin bahwa aset-aset tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjamin bahwa keseluruhan target dapat tercapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan

upaya untuk menjamin bahwa setiap aset organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Menurut Mahmudi (2013 : 83) *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Ekonomi
Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi
Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas
Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, strategi dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal organisasi dapat mencapai tujuannya, dengan kata lain organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam arti bahwa penggunaan atau pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009 : 130). Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

- A. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)
Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
- B. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009 : 130). Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi *value for money* adalah:

- a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dengan maksud pelayanan yang dilaksanakan tepat sasaran.
- b) Menaikan mutu pelayanan publik.

- c) Mengurangi biaya pelayanan publik.
- d) Alokasi belanja yang lebih berpusat pada kepentingan publik.
- e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat sasaran sehingga dapat menciptakan mutu pelayanan yang baik dengan menggunakan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Mahmudi (2013 : 83-84) menjelaskan bahwa, ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, kerangka kerja, dan produk modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk mendapatkan unit input. Ekonomi memiliki pemahaman bahwa aset *input* harus diperoleh dengan biaya yang lebih rendah (*spending less*), yaitu biaya yang mendekati harga pasar. Secara metodis, ekonomi adalah pemeriksaan antara *input* dan nilai rupiah untuk mendapatkan *input* tersebut. Tingkat ekonomi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Presentasi yang diperoleh dari suatu kegiatan

Input = Presentase nilai ekonomi

Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut:

< 90% berarti sangat efisien.

90 s.d. 99% berarti efisien.

100% berarti cukup efisien.

> 100% berarti tidak efisien.

Pengukuran Efektivitas

Mahmudi (2013 : 86) menjelaskan bahwa, efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berpusat pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dicapai bisa memenuhi tujuan yang diinginkan (*spending wisely*).

Tingkat efektivitas dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggarannya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

keterangan:

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan

Output = Presentase yang diperoleh dari suatu kegiatan

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria efektivitas dalam pengukuran kinerja keuangan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan persentase penilaian sebagai berikut:

≥ 100% berarti efektif.

85 s.d. 99% berarti cukup efektif.

65 s.d. 84% berarti kurang efektif.

≤ 65 berarti tidak efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan Nomor 2, definisi anggaran yaitu “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun (Darise, 2008 : 133).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan data tentang pengakuan dan rencana keuangan dari elemen pengungkapan pada alasan lain untuk periode tertentu. LRA menyajikan garis besar sumber, peruntukan, dan pemanfaatan asset moneter yang diawasi oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu objek di mana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money*, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil data dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan selesai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian penjelasan, dalam hal ini data didapatkan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau data yang dapat berupa angka, dalam hal ini data yang dapat digunakan adalah Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah tahun anggaran

2018 – 2019.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam bentuk studi kasus yaitu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Penelitian ini akan mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Proses analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menganalisis kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
2. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan *konsep value for money* untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan tiga elemen pengukuran sebagai berikut:

- a. Rasio Ekonomi

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

3. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh maka penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah dari tahun 2018-2019.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 untuk mengukur kinerja anggaran berdasarkan konsep *value for money* yaitu dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Pengukuran kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Jasa.

Tabel 4.1 Laporan Keuangan Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2019

Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/(Kurang)	%

2018	2.941.795.075,00	2.927.641.388,00	14.153.687	0,99
2019	3.210.920.000,00	3.164.447.718,00	46.472.282,00	0,98

Sumber Data: data sekunder yang diolah

Anggaran belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Penambahan anggaran pada belanja tidak langsung khususnya pada belanja pegawai menyebabkan terjadinya kenaikan anggaran yang cukup signifikan di tahun 2019. Belanja pegawai tidak langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya anggaran belanja. Anggaran belanja yang dapat direalisasikan hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan, hanya sekitar 2% sampai 3% dari total anggaran yang tidak terealisasi. Belanja yang dapat direalisasikan sesuai dengan target anggaran mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

Untuk Mencapai target dari indicator-indikator sasaran, maka diperlukan program atau kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai sasaran dan indikator sasaran. Berikut adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Di Sulawesi Utara untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja kegiatan di tahun 2018-2019.

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018- 2019

NO	Program & Kegiatan	FISIK						KEUANGAN					
		Target		Realisasi		%		Target		Realisasi		%	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
A	Belanja Barang dan Jasa												
1	Belanja Bolpoint	500 Buah	3195 Buah	500 Buah	3195 Buah	100	100	3.600.000	24.560.000	3.600.000	24.560.000	100	100
2	Belanja Post IT	525 Buah	480 Buah	525 Buah	480 Buah	100	100	8.997.000	5.424.000	8.997.000	5.424.000	100	100
3	Belanja Binder Clips	13.075 Kotak	12.800 Kotak	13.075 Kotak	12.800 Kotak	100	100	121.800.000	128.536.000	121.739.700	128.500.180	99	99
4	Belanja Map Folio	10.900 Buah	11.072 Buah	10.900 Buah	11.072 Buah	100	100	57.605.000	60.896.000	57.605.000	60.896.000	100	100
5	Belanja Tinta Botol	540 Botol	384 Botol	540 Botol	384 Botol	100	100	76.750.000	52.760.000	76.743.400	52.760.000	99	100
6	Kalkulator	-	16 Buah	-	16 Buah	-	100	-	2.000.000	-	2.000.000	-	100
7	Belanja Kertas Foto	1575 Pack	1120 Pack	1575 Pack	1120 Pack	100	100	41.580.000	28.568.000	41.580.000	28.568.000	100	100

8	Belanja Veburator	70 Buah	32 Buah	70 Buah	32 Buah	100	100	2.625.000	1.260.000	2.625.000	1.260.000	100	100
9	Belanja Odner	350 Buah	1192 Buah	350 Buah	1192 Buah	100	100	9.625.000	42.423.000	9.625.000	42.423.000	100	100
10	Belanja Kertas HVS	2075 Rim	2110 Rim	2072 Rim	2110 Rim	99	100	122.475.935	121.880.000	122.073.400	121.880.000	99	100

B	Belanja Jasa Kantor	2018	2019	2018	2019			2018	2019	2018	2019		
1	Belanja Kawat/Faksi mili/Internet	25 Paket	65 Paket	20 Paket	55 Paket	8	8	17.400.000	47.850.000	11.522.341	35.037.770	6	7
2	Belanja Jasa THL	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 orang	1	1	474.600.000	549.360.000	469.430.250	535.936.816	9	9
3	Belanja Surat Kabar	-	1000 Paket	-	1000 Paket	-	1	-	7.200.000	-	7.200.000	-	1
4	Belanja Jasa Tenagakerja Sopir	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Oran g	1	1	42.000.000	42.000.000	42.000.000	38.500.000	1	9
5	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Oran g	1	1	17.472.000	17.472.000	15.413.250	17.466.120	8	9
6	Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Oran g	1	1	3.144.960	3.150.000	2.774.385	3.143.931	8	9
C	Belanja Persyaratan Bermotor												
1	Belanja Jasa Service	2 Kali, 2 Kenda raan	2 Kali, 2 Kenda raan	2 Kali, 2 Kend aaraan	2 Kali, 2 Kend aaraan	1	1	10.000.000	32.000.000	9.995.115	28.314.306	9	9
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2 Kenda raan	2 Kenda raan	2 Kend aaraan	2 Kend aaraan	1	1	58.500.000	47.000.000	58.450.000	46.695.738	9	9
3	Belanja bahan bakar minyak/gas	2 Kenda raan	2 Kenda raan	2 Kend aaraan	2 Kend aaraan	1	1	30.000.000	47.772.000	29.700.847	29.700.847	9	6
4	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2 Kenda raan	2 Kenda raan	1Ken daraa n	2 Kend aaraan	5	1	4.700.000	5.061.000	1.269.900	5.061.000	2	1
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2 Kenda raan	2 Kenda raan	1 Kend aaraan	2 Kend aaraan	5	1	2.800.000	5.061.000	620.000	5.061.000	2	1

D	Belanja Cetak dan Pengadaan												
1	Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner	26 Kegiatan	24 Kegiatan	26 Kegiatan	24 Kegiatan	100	100	39.750.000	58.800.000	39.748.000	56.795.000	99	98
2	Belanja Pengadaan FC dan Surat Edaran	721.314 Kali	278.873 Kali	721.314 Kali	278.873 Kali	100	100	263.341.161	225.433.000	263.325.200	225.409.000	99	99
E	Belanja Sewa												
1	Belanja Sewa Gedung/Kantor	1 kali	2 kali	1 kali	2 kali	100	100	79.600.000	120.000.000	79.600.000	118.500.000	100	98
F	Belanja Sewa Sarana Mobilitas												
1	Belanja Sewa Kendaraan Mitsubishi Pajero	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	12.250.000	12.250.000	12.200.000	12.200.000	99	99
G	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor												
1	Belanja Sewa Tenda	1 Kali	-	1 Kali	-	100	-	74.000.000	-	74.000.000	-	100	-
2	Belanja Sewa Sound System	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	100	48.000.000	35.000.000	48.000.000	34.500.000	100	99
3	Belanja Sewa Alat-Alat Studio	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	100	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000	100	100
H	Belanja Makanan dan Minuman												
1	Belanja Makanan dan	26 Kali	24 Kali	26 Kali	24 Kali	100	100	271.736.040	357.400.000	271.498.750	356.579.000	99	99

	Minuman Rapat	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan								
2	Belanja Makan dan Minuman Tamu	6 Kali 12 Bulan	13 Kali 12 Bulan	6 Kali 12 Bulan	13 Kali 12 Bulan	100	100	6.000.000	28.800.000	6.000.000	27.780.000	100	99
3	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	20 Kali	15 Kali	20 Kali	Tidak ada	100	100	8.500.000	3.000.000	7.170.000	-	84	0
I Belanja Pakaian													
1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	53 Pasang	54 Pasang	53 Pasang	54 Pasang	100	100	39.750.000	60.000.000	39.750.000	57.354.000	100	97
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	54 Pasang	-	54 Pasang	-	100	-	41.000.000	-	40.909.000	-	99
J Belanja Perjalanan Dinas													
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38 kali	38 kali	38 kali	38 kali	100	100	228.010.000	395.850.000	226.675.000	393.879.000	98	98
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162 Kali	119 Kali	162 Kali	119 Kali	100	100	479.692.979	408.400.000	476.025.522	407.425.657	99	99
K Belanja Pemeliharaan Peralatan													
1	Service Komputer	4 Unit	5 Unit	4 Unit	5 Unit	100	100	12.850.000	10.000.000	12.844.728	10.000.000	99	100
2	Service AC	2 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	100	100	9.000.000	1.600.000	9.000.000	1.600.000	100	100
L Belanja Honorium PNS													
1	Belanja Honorium Tenaga Ahli	22 Orang 8 Kegiatan	54 Orang 24 Kegiatan	22 Orang 8 Kegiatan	54 Orang 24 Kegiatan	100	100	116.700.000	161.200.000	116.650.000	161.050.000	99	99
2	Belanja Honorium Satuan Pengelolah Keuangan	21 Orang 7 Kegiatan	-	21 Orang 7 Kegiatan	-	100	-	45.240.000	-	44.890.000	-	99	-

3	Belanja Honorium Satuan Pengelolah Barang	21 Orang 7 Kegiatan	-	21 Orang 7 Kegiatan	-	100	-	31.800.000	-	31.800.000	-	100	-
M	Belanja Honorium Pegawai honorer												
1	Honorium Narasumber Kegiatan	6 Orang 2 Kegiatan	-	6 Orang 2 Kegiatan	-	100	-	30.000.000	-	30.000.000	-	100	-

Pembahasan

Value For Money adalah konsep pengelolaan organisasi sector public berdasarkan tiga elemen utama yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini bahwa akan dilakukan analisis *Value For Money* pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sektor Publik di Sulawesi Utara pada tahun 2018-2019. Didalam mengukur kinerja sesuai konsep *Value For Money* maka akan dilakukan 3 pendekatan pengukuran yakni Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Berikut ini adalah uraian dari tiap-tiap elemen :

Pengukuran kinerja Ekonomi dalam konsep *Value for Money* yaitu Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sector public dapat mengelola keuangan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produkti. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik dimungkinkan

Pengukuran Ekonomi Menurut Mahmudi (2015:84) yaitu :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Pengertian *Input* merupakan sumber dana yang dipergunakan untuk suatu pelaksanaan kebijakan program atau aktivitas. Maka jika dikaitkan dengan yang terjadi pada Biro Organisasi Sekertariat Daerah Sulawesi Utara yang dimaksudkan dengan input adalah realisasi anggaran dimana realisasi anggaran merupakan dana yang diterima oleh organisasi yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Nilai *Input* merupakan sejumlah dana yang diperkirakan akan dikeluarka oleh suatu organisasi untuk memenuhi kepentingan. Hal ini dapat dikaitkan dengan anggaran dari Biro Organisasi Sekertariat Daerah Sulawesi Utara mengingat bahwa anggaran adalah sejumlah dana yang akan dipakai pada periode tertentu untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan. Sesuai hasil penelitian *Input* tiap kegiatan dapat dilihat dalam kolom realisasi keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah yang dapat dilihat dalam table 4.2 tentang Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Organisasi Sekertariat Daerah Tahun 2018-2019.

Oleh karena itu, maka dalam analisis Value For Money elemen ekonomi setiap kegiatan pada tahun 2018-2019 setelah dimasukan kedalam formula pengukuran ekonomi maka hasilnya diperlihatkan pada table 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Tabel Pengukuran Ekonomi Kegiatan Biro Organisasi Sekertariat Daerah

Program	Kegiatan	2018	2019
---------	----------	------	------

		Nilai Input	Input	Tingkat Ekonomi (%)	Nilai Input	Input	Tingkat Ekonomi (%)
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bolpoint	3.600.000	3.600.000	100	24.560.000	24.560.000	100
	Belanja Post IT	8.997.000	8.997.000	100	5.424.000	5.424.000	100
	Belanja Binder Clips	121.800.000	121.739.700	99	128.536.000	128.500.180	99
	Belanja Map Folio	57.605.000	57.605.000	100	60.896.000	60.896.000	100
	Belanja Tinta Botol	76.750.000	76.743.400	99	52.760.000	52.760.000	100
	Kalkulator	-	-	-	2.000.000	2.000.000	100
	Belanja Kertas Foto	41.580.000	41.580.000	100	28.568.000	28.568.000	100
	Belanja Veburator	2.625.000	2.625.000	100	1.260.000	1.260.000	100
	Belanja Odner	9.625.000	9.625.000	100	42.423.000	42.423.000	100
	Belanja Kertas HVS	122.475.935	122.073.400	99	121.800.000	121.800.000	100
	Belanja Jasa Kantor	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.400.000	11.522.341	66	47.850.000	35.037.770
Belanja Jasa THL		476.600.000	469.430.250	99	549.360.000	535.936.816	98
Belanja Surat Kabar		-	-	-	7.200.000	7.200.000	100
Belanja Jasa Tenagakerja Sopir		42.000.000	42.000.000	100	42.000.000	38.500.000	91
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan		17.472.000	15.413.250	88	17.472.000	17.466.120	99
Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan		3.144.960	2.774.385	88	3.150.000	3.143.931	99

Belanja Persyaratan Kendaraan Bermotor	Belanja Jasa Service	10.000.000	9.995.115	99	32.000.000	28.314.306	97
	Belanja Penggantian Suku Cadang	58.500.000	58.450.000	99	47.000.000	46.695.738	99
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000	29.700.847	99	47.772.000	29.700.847	66
	Belanja Pajak Kendaraan	4.700.000	1.269.900	27	5.061.000	5.061.000	100
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000	620.000	22	5.061.000	5.061.000	100
Belanja Cetak dan Pengadaan	Belanja Cetak Baliho dan Roll Baner	39.750.000	39.748.000	99	58.800.000	56.795.000	98
	Belanja Pengadaan FC dan Surat Edaran	263.341.161	263.325.200	99	225.433.000	225.409.000	99
Belanja Sewa	Belanja Sewa Gedung/Kantor	79.600.000	79.600.000	100	120.000.000	118.500.000	98
Belanja Saran Mobilitas	Belanja Sewa Kendaraan Mitsubishi Pajero	12.250.000	12.200.000	99	12.250.000	12.200.000	99
Belanja Sewa Perlengkapan dan	Belanja Sewa Tenda	74.000.000	74.000.000	100	-	-	-

Peralatan Kantor							
	Belanja Sewa Sound System	48.000.000	48.000.000	100	35.000.000	34.500.000	99
	Belanja Sewa Alat-Alat Studio	39.900.000	39.900.000	100	39.900.000	39.900.000	100
Belanja Makanan dan Minuman	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	271.736.040	271.498.750	99	357.400.000	356.579.000	99
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	6.000.000	100	28.800.000	27.780.000	99
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000	7.170.000	84	3.000.000	0	0
Belanja Pakaian	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.750.000	39.750.000	100	60.000.000	57.354.000	97
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	41.000.000	40.909.000	99
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.010.000	226.675.000	98	395.850.000	393.879.000	98
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	479.692.979	476.025.522	99	408.400.000	407.425.657	99
Belanja Pemeliharaan Peralatan	Service Komputer	12.850.000	12.844.728	99	10.000.000	10.000.000	100
	Service AC	9.000.000	9.000.000	100	1.600.000	1.600.000	100
Belanja Honorium PNS	Belanja Honorium Tenaga Ahli	116.700.000	116.650.000	99	161.200.000	161.050.000	99
	Belanja Honorium Satuan Pengelolah Keuangan	45.240.000	44.890.000	99	-	-	-
	Belanja Honorium Satuan Pengelolah Barang	31.800.000	31.800.000	100	-	-	-
Belanja Honorium Pegawai Honoror	Honorium Narasumber Kegiatan	30.000.000	31.800.000	100	-	-	-
JUMLAH							

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja program kegiatan Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari elemen ekonomi diketahui bahwa:

- a. Rasio ekonomi dari tahun 2018-2019 menunjukkan kinerja program kegiatan Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup ekonomis. karena dapat menghasilkan rasio hampir 100% pada tahun 2018 mencapai 93,76% dengan jumlah 38 kegiatan dan pada tahun 2019 sebesar 94,89% dengan jumlah kegiatan 37. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah berhasil mengelola penggunaan

anggaran belanja dengan baik dan dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja program kegiatan Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari elemen efisiensi diketahui bahwa:

a. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2018-2019 menunjukkan kinerja program kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sulawesi Utara dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh pada tahun 2018 107,76% dan pada tahun 2019 mencapai 100,02% dalam tahun 2018 terdapat 22 kegiatan yang dinilai efisien dan pada tahun 2019 terdapat 21 kegiatan yang dinilai efisien akan tetapi terdapat 1 kegiatan yang dapat dikatakan tidak efisien dikarenakan kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan yang terdapat pada tahun 2019 tidak ada realisasi sedangkan untuk anggaran ada dengan besar anggaran sebesar 3.000.000

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja program kegiatan Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari elemen efektivitas diketahui bahwa:

a. Rasio efektivitas pada tahun 2018 di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sulawesi Utara jika dinilai dari rata-rata dapat mencapai angka 105,92% akan tetapi hanya terdapat 3 kegiatan yang dapat dikatakan efektif yaitu Belanja Kawat/Faksimili/Internet, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, dan Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Dan pada tahun 2019 tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan angka persentase yang hanya mencapai 97,81% sedangkan suatu program kegiatan dapat dikatakan efektif jika melebihi 100%. Di tahun 2019 dikatakan tidak efektif karena terdapat 1 program kegiatan yaitu Belanja Makan dan Minum Kegiatan yang jika diukur menggunakan rumus efektivitas hanya mencapai angka 0% karena pada saat itu anggaran belanja 3.000.000 akan tetapi realisasinya tidak ada.

Saran

Memperhatikan hasil analisis kinerja program kegiatan berdasarkan konsep *value for money* dengan menggunakan pengukuran rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, maka Biro Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara jika dinilai dari elemen ekonomi dan efisien sudah bagus dan dapat mempertahankannya akan tetapi jika diukur dari segi efektif belum efektif maka untuk Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sulawesi Utara agar dapat lebih memperhatikan realisasi anggaran yang ada dan dapat merealisasikannya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.
Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi 1.
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press : Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*